



The Influence Of Local Revenue On Personnel Expenditure In The City Of Bengkulu

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pegawai Di Kota Bengkulu

Mayang Sekar Sari ¹⁾; Wagini ²⁾; Abdul Rahman ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ mayangsekarsari100@gmail.com ; ²⁾ wagini@unived.ac.id , ³⁾ abdulrahman@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 Juni 2025]

Revised [10 Juli 2025]

Accepted [11 Juli 2025]

KEYWORDS

Regional Original Income (PAD), Employee Expenditures.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Sumber keuangan daerah tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan tertentu yang diberikan kepada daerah. Sumber keuangan ini dikenal sebagai PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber PAD untuk membiayai sendiri penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 kota dan kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi untuk data PAD dan belanja pegawai periode 2019 sampai 2023. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, uji determinasi dan uji hipotesis t. Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi $Y = 250.608,568 + 1,649X$ dengan arah regresi positif, artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai karena nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat. Koefisien determinasi sebesar 0,711 yaitu berarti variabel PAD mampu mempengaruhi belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Local Revenue (PAD) on employee spending in Bengkulu Province. The sample in this study was 10 cities and regencies in Bengkulu Province. The data collection method is documentation for PAD data and employee spending for the period 2019 to 2023. The data analysis method used is simple regression analysis, determination test and t-hypothesis test. The results of multiple linear regression testing obtained the regression equation $Y = 250,608.568 + 1.649X$ with a positive regression direction, meaning that the higher the PAD, the higher the employee spending. Local Revenue (PAD) has a significant effect on employee spending because the significant value of 0.000 is smaller than 0.05. This means that the higher the PAD, the higher the employee spending. The determination coefficient of 0.711 means that the PAD variable is able to influence employee spending by 71.1%, while the remaining 28.9% is explained by other factors outside the independent variables used in this study.

PENDAHULUAN

Negara dengan wilayah yang luas membutuhkan sistem pemerintahan yang baik. Ada setidaknya dua alasan mengapa sistem ini sangat penting. Pertama, itu berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai wilayah. Kedua, itu memungkinkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan cara mengembangkan taraf hidup mereka selaras dengan peluang dan hambatan yang dihadapi dalam koridor kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa tindakan harus dilakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yang berarti pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, politik, dan administrasi kebijakan. Tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal antara daerah dan pemerintah pusat, atau imbalance fiskal horizontal, dan vertikal (Harliza & Anitasari, 2017:133). PAD termasuk dalam penerimaan dan pendapatan daerah, bersama dengan dana perimbangan dan pendapatan daerah yang lain yang sah. Menurut Saragih (2003) dan Sukartono (2009:45), peningkatan PAD harus berdampak pada ekonomi lokal. Jumlah PAD yang meningkat menunjukkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pemerintahan daerah. PAD membantu kemandirian di daerah otonomi dan merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai PAD kabupaten/kota termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain (sukartono 2009:45). Dari ketentuan di atas, jelas bahwa sumber daya keuangan daerah berasal dari pengelolaan dan penggunaan sumber daya tertentu yang diberikan kepada daerah serta dari pemerintah pusat. Sumber daya keuangan ini disebut PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk

memperoleh sumber daya PAD untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Akibatnya, sumber daya PAD yang ada harus terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat penerimaan yang paling tinggi. "APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan, sehingga besarnya pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan belanja daerah termasuk belanja pegawai," kata PP No 12 tahun 2019.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Abdul Halim (2012) dalam Mardismo (2018), ada dua cara untuk menjelaskan akuntansi sektor publik. Pertama, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai organisasi yang bekerja untuk menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo 2018:179).

Tabel 1. Sifat dan Karakteristik Sektor Publik

Faktor Ekonomi	Faktor Kultural
a. Pertumbuhan ekonomi b. Tingkat inflasi c. Tenaga kerja d. Nilai tukar mata uang e. Infrastruktur f. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)	a. Sistem nilai di Masyarakat b. Historis c. Sosiologi masyarakat d. Karakteristik masyarakat e. Tingkat pendidikan
Faktor Politik	Faktor Demografi
a. Hubungan negara dan masyarakat b. Legitimasi pemerintah c. Tipe rezim yang berkuasa d. Ideologi 3egara e. Elit politik dan massa f. Jaringan Internasional g. Kelembagaan	a. Pertumbuhan penduduk b. Struktur usia penduduk c. Migrasi d. Tingkat kesehatan e. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

Sumber : Mardiasmo (2021)

Menurut American Accounting Association (dalam Glynn, dikutip oleh Mardiasmo (2021: 25), tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis; tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kewajiban mereka.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hubungann Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pda Pasal 26 ayat (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah itu sendiri, menurut Halim & Kusufi (2014:15). Namun, menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah itu sendiri, menurut Halim & Kusufi (2014:15). Namun, menurut Mardiasmo (2018), PAD adalah pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya.



Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Apriliawati, 2018 : 15).

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel kuantitatif X dan variabel kuantitatif Y. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang diberikan adalah angka-angka, mulai dari pengumpulan data hingga penafsirannya, dan terakhir menampilkan hasil penelitian dalam bentuk angka, Cahyono (2021:19). Untuk memudahkan pengukuran dan analisis, beberapa variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di provinsi Bengkulu.
- b) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan belanja pegawai di provinsi Bengkulu.

Peneliti mengumpulkan populasi, sekumpulan objek penelitian yang masing-masing memiliki karakteristik yang sama yang dipelajari sebelum peneliti sampai pada kesimpulan. Sugiyono (2019:61) menyatakan Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari: objek atau subyek yang memiliki kualitas dan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini melibatkan semua kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu, total 10 kota dan kabupaten. Baik jumlah populasi maupun karakteristiknya terdiri dari sampel (Sugiyono, 2019: 62). Dalam penelitian ini, sampling jenuh digunakan. Sugiyono (2015:68) menyatakan bahwa sampling jenuh berlaku untuk semua anggota populasi sebagai sampel. Penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil atau populasi yang relatif kecil (kurang dari 30) biasanya melakukan hal ini. Pada penelitian ini, sampelnya adalah sepuluh pemerintah daerah setingkat Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, yang dilakukan dari tahun 2019 hingga 2023. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko
10. Kabupaten Seluma

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Dokumen adalah dokumentasi peristiwa masa lalu, menurut Sugiyono (2019:240). Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental individu. Penulis menggunakan data statistik keuangan pemerintah Provinsi daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu pendapatan asli daerah dan belanja pegawai Provinsi Bengkulu dari tahun 2019 hingga 2023.

Metode Analisis Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan.

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, plot probabilitas normal digunakan untuk melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah kontribusi variabel independen dan dependen dalam model regresi sama-sama

normal atau sedikit normal. Menurut Ghozali(2021:163) jika gambar distribusi memiliki penyebaran titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal, maka variabel tersebut dapat dianggap normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan dalam perbedaan antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2021:125). Menurut Ghozali (2021:36), dasar analisisnya adalah bahwa heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tertentu yang teratur, misalnya jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar, kemudian menyempit). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2019:216) Analisis regresi linear sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap belanja pegawai dengan rumus:

Uji Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t yang bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel PAD (X) terhadap belanja pegawai(Y). dengan rumus (Sugiyono, 2019:148):

$$t \text{ hitung} = \frac{b - \beta}{S_b}$$

Keterangan :

b = Koefisien Regresi

β = Hipotesis 0

S_b = Kesalahan standar koefisien regresi

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

H0 : PAD memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu

Ha : PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai di Provinsi Bengkulu.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan koefisien determinasi adalah:

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Sumber : Sugiyono (2017:265)

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat pegunungan Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 hektar atau 19.919,33 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Adapun luas daerah menurut Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 2. Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Luas-Area (Km ²)	Persentase (%) Terhadap Luas Bengkulu
Bengkulu Selatan	1.186,10	5,95
Rejang Lebong	1.639,98	8,23
Bengkulu Utara	4.324,60	21,72
Kaur	2.369,05	11,89
Seluma	2.400,44	12,05
Lebong	1.921,82	9,65
Mukomuko	4.036,70	20,27
Kepahiang	665,00	3,34
Bengkulu Tengah	1.223,94	6,14
Kota Bengkulu	151,70	0,76

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2025

Selain luas daerah menurut Kabupaten atau Kota, gambaran objek penelitian juga dapat dilihat dari luas wilayah menurut ibukota Kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun luas wilayah ibukota Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Luas Wilayah Menurut Ibukota Kabupaten/Kota, Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Bengkulu Selatan	Manna	11	159
Rejang Lebong	Curup	15	156
Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	224
Kaur	Bintuhan	15	195
Seluma	Tais	14	202
Lebong	Tube	13	109
Mukomuko	Mukomuko	15	152
Kepahiang	Kepahiang	8	117
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	10	143
Bengkulu	Bengkulu	9	67
Provinsi Bengkulu		129	1.524

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2025

Menurut proyeksi tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 1.874.944 orang, terdiri dari 956.265 pria dan 918.679 wanita, dengan pertumbuhan sebesar 1,63% dibandingkan dengan proyeksi tahun 2015. Persentase pertumbuhan laki-laki sebesar 1,61% dan persentase pertumbuhan perempuan sebesar 1,65%. Sementara itu, rasio jenis kelamin rata-rata adalah 0,25%. Pada tahun 2016, jumlah rumah tangga di Provinsi Bengkulu mencapai 472.832, dengan rata-rata 4 orang per rumah tangga. Ini adalah pertumbuhan sebesar 1,57% dari tahun 2015.

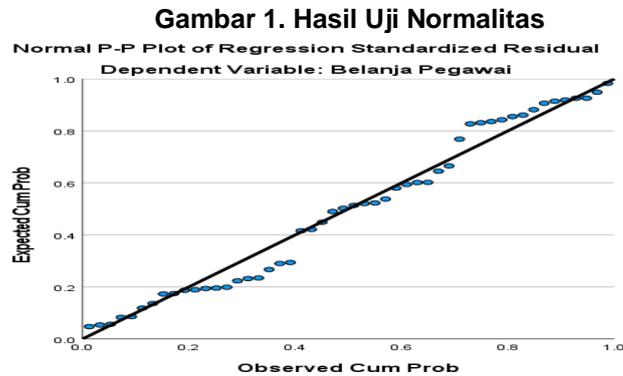
Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persen (%)
1	Bengkulu Selatan	152.194	8,117256
2	Rejang Lebong	256.094	13,65875
3	Bengkulu Utara	287.439	15,33054
4	Kaur	115.805	6,176451
5	Seluma	185.587	9,898269
6	Lebong	109.190	5,823641
7	Mukomuko	177.131	9,447269
8	Kepahiang	132.415	7,062344
9	Bengkulu Tengah	107.791	5,749025
10	Kota Bengkulu	351.298	18,73645
	Provinsi Bengkulu	1.874.944	100

Sumber : Bengkulu Dalam Angka, 2025

Hasil uji Normalitas

1. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas data.



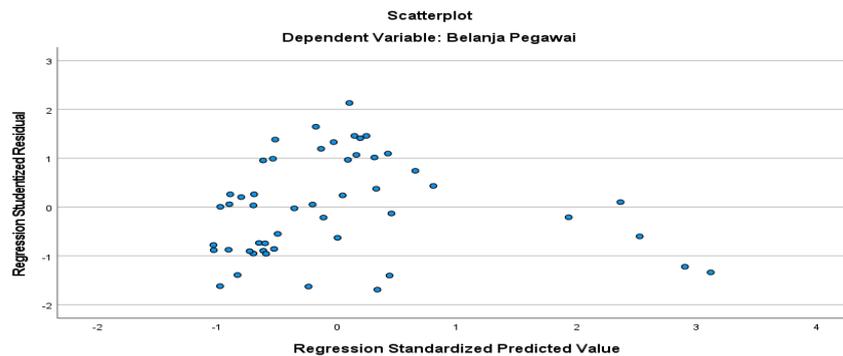
Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan gambar grafik diatas tampak bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa plot dispersi terdiri dari titik-titik yang tersebar secara acak tanpa pola yang jelas. Hasil dari semua pengujian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap asumsi regresi klasik, atau bahwa heteroskedastisitas sama sekali tidak ada masalah. Karena asumsi dipenuhi, analisis selanjutnya dapat dimulai.

Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pegawai di Provinsi Bengkulu. Perhitungan statistik dalam analisis sederhana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	250608.568	12108.320		20.697	.000	
PAD	1.649	.152	.843	10.858	.000	

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai
 Sumber : Hasil penelitian (data diolah), 2025



Dari tabel di atas hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS 27 maka dapat diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 250.608,568 + 1,649X$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta 250.608,568 mempunyai arti bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah dianggap tetap maka variabel belanja pegawai akan tetap sebesar 250.608,568
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Pegawai (Y) Nilai koefisien regresi variabel X1 adalah sebesar 1,649, artinya apabila X mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,649 kali

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji signifikan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Hasil uji statistik uji t terdapat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	250608.568	12108.320		20.697	.000
PAD	1.649	.152	.843	10.858	.000

a. Dependent Variable: Belanja Pegawai

Sumber : Hasil penelitian (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat hasil uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk X sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan berada di bawah 0,05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja pegawai di Provinsi Bengkulu periode 2019-2023 Maka hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Koefisien determinasi

Adapun hasil pengujian koefisien determinasi seperti pada table berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 ^a	.711	.705	49600.72598

a. Predictors: (Constant), PAD

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Dari Tabel diatas dapat diketahui nilai R-squared sebesar 0,711 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel PAD mampu menjelaskan variabel belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar (100% - 71% = 28,9%) 1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi $Y = 250.608,568 + 1,649X$ dengan arah regresi positif, artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pegawai karena nilai signifikan sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka belanja pegawai juga akan semakin meningkat.

3. Koefisien determinasi sebesar 0,711 yaitu berarti variabel PAD mampu mempengaruhi belanja pegawai sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil peneltiain, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Provinsi Bengkulu untuk lebih meningkatkan pendapatan daerahnya dengan memperhatikan jenis-jenis sumber pendapatan daerah, karena dari masing-masing pendapatan daerah mampu meningkatkan PAD.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dalam mencari solusi meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Dengan demikian dana alokasi umum yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkurang dan pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan operasional maupun belanja daerahnya dengan menggunakan pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrelia Afrida, S. E. 2024. "KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR." *Akuntansi Sektor Publik* 15.
- Apriliawati, Suminar &. 2018. "Bab II Landasan Teori." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Awanziz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 1(2).
- Cahyono, Agus Adi. 2021. "Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring Berbasis Grup WhatsApp Pada Mata Pelajaran Pemrograman Dasar Di SMKN Kebonagung." *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 1.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. <https://ppid/sulselprov.go.id>. (t.thn.). <https://www.bapendasulsel.web.id>. (t.thn.).
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim dan M. Syan Kasufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Samba Empat
- Halim, M., Husmaruddin, M. P., & Januse, N. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 1(1).
- Harliza, Titik, and Merri Anitasari. 2017a. "Analisis Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 5(2).
- Hasanah, Miftahul, and Merri Anitasari. 2019. "Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas)." *Convergence: The Journal of Economic Development* 1(2):1–12.
- Herrmann, Helmut, and Herbert Bucksch. 2014. "Self-Supporting." *Dictionary Geotechnical Engineering/Wörterbuch GeoTechnik* 1197–1197. doi: 10.1007/978-3-642-41714-6_191957.
- Lihawa, M. P. L., Runtu, T., & Mintalangi, S. S. E. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(4), 1554–1563. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.52114>